

**KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN
PADA KANTOR STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN
POLITIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP AT THE OFFICE OF THE GOVERNOR'S EXPERT
STAFF FOR GOVERNMENT, LAW AND POLITICS OF SOUTHEAST SULAWESI
PROVINCE**

La Ode Fasikin¹

¹ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

*Email Koresponden : fasikinlaode386@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan kewirausahaan di Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan kewirausahaan yang didorong oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya membantu dalam mengadaptasi birokrasi terhadap perubahan dan tantangan zaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah reformasi birokrasi memiliki dampak nyata yang positif bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan, kantor ini menjadi pilar penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel, sesuai dengan tuntutan era modern.

Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Birokrasi, Kepemimpinan Kewirausahaan

Abstract

This study aims to analyze entrepreneurial leadership in the Office of the Governor's Expert Staff for Government, Law, and Politics of Southeast Sulawesi Province.. The methodology of this study uses a qualitative descriptive approach, with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that entrepreneurial leadership driven by the Governor's Expert Staff for Government, Law, and Politics of Southeast Sulawesi Province not only helps in adapting the bureaucracy to changes and challenges of the times, but also ensures that every step of bureaucratic reform has a real positive impact on society. By implementing entrepreneurial principles in governance, this office becomes an important pillar in efforts to create a better, more transparent, and more accountable government, in accordance with the demands of the modern era.

Keywords : State Civil Apparatus, Bureaucracy, Entrepreneurial Leadership

PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di tanah air beberapa waktu silam telah menciptakan beberapa perubahan signifikan pada sistem pemerintahan termasuk kebutuhan akan ASN sebagai sumber daya yang memiliki kinerja tinggi, kompetensi dan berintegritas yang baik yang menghasilkan pelayanan publik yang optimal (Holidin et al., 2017; Thoha, 2017; Zein, 2023).

Reformasi birokrasi dan keadaan ASN saat ini membutuhkan beberapa jenis kepemimpinan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin, diantaranya kepemimpinan kewirausahaan, terutama dalam beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi terutama pada aspek teknologi (Setyasih, 2022; Zein, 2023).

Kepemimpinan kewirausahaan adalah gaya kepemimpinan yang menggabungkan karakteristik wirausaha dengan kemampuan memimpin organisasi. Pemimpin kewirausahaan tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga aktif mencari peluang baru, mendorong inovasi, dan mengelola risiko secara efektif (Ghodang & Ghodang, 2023; Stone, 2023). Transformasi tata kelola pemerintahan saat ini mengedepankan perspektif lingkungan menjadi semakin penting dalam konteks global saat ini.

Kantor Staff ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sultra memiliki tugas pokok dan fungsi yang berfokus pada urusan pemerintahan, hukum dan politik di daerah (Sulawesi Tenggara) terutama dalam membantu Gubernur dan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja instansi pemerintah daerah, terutama dalam konteks perbaikan layanan publik. Dukungan yang diberikan oleh staf ahli ini dapat mencakup berbagai aspek, yang berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik.

Beberapa peran strategis dimainkan oleh Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya Penyusunan Kebijakan dan Regulasi yang tepat, Pendampingan dan Pengawasan Implementasi Kebijakan, Mendorong peningkatan kapasitas SDM, mendorong sinergi dan kolaborasi antar instansi, serta menjadi bagian dari mendorong transformasi digital pada instansi pemerintah.

Transformasi SDM dalam hal ini ASN dan P3K di Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas pegawai agar mampu memenuhi tuntutan tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks di era modern ini. Keterkaitan transformasi SDM dan dorongan pentingnya peran kepemimpinan kewirausahaan sangat erat terutama dalam mendorong pengembangan organisasi publik yang adaptif dan inovatif, seperti yang diperlukan di Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kepemimpinan kewirausahaan dalam transformasi SDM, Kantor Staf Ahli Gubernur dapat membangun tim yang lebih inovatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah diungkap, mendorong penulis mengambil topik kepemimpinan kewirausahaan pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara.

KAJIAN PUSTAKA

KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN DALAM INSTANSI PUBLIK

Kebutuhan akan kepemimpinan kewirausahaan dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini semakin mendesak mengingat berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia (Ghodang & Ghodang, 2023).

Rahadian (2019), Stone (2023), dan Widanarto (2019) menyatakan beberapa faktor yang menekankan pentingnya kepemimpinan kewirausahaan di kalangan ASN dan kantor pemerintahan meliputi:

1. Adaptasi terhadap perubahan dan disrupsi
2. Efisiensi dan Produktivitas
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Pengembangan Kapasitas ASN
5. Menghadapi Tantangan sosial dan ekonomi
6. Meningkatkan kepercayaan publik

PERAN INSTANSI PUBLIK TERHADAP TRANSFORMASI BIROKRASI

Tugas pokok dan fungsi pada kantor pemerintah memiliki keterkaitan yang erat dengan transformasi digital pemerintahan. ASN Sebagai individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi birokrasi berbasis digital yang dilakukan selaras dengan tujuan pemerintahan yang lebih luas, serta mematuhi prinsip hukum dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Rahadian (2019) dan Widanarto (2019) menyatakan beberapa keterkaitan utama dari peran kantor pemerintahan terhadap tugas pokok fungsi dikaitkan dengan transformasi birokrasi berbasis layanan digital pemerintahan diantaranya :

1. Penyusunan dan rekomendasi kebijakan
2. Penguatan tata kelola pemerintahan
3. Pemantauan dan evaluasi kinerja birokrasi
4. Peningkatan kapasitas SDM Birokrasi
5. Kolaborasi dan Sinergi Antar Instansi
6. Advokasi Kebijakan dan Hubungan Politik
7. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
8. Respon terhadap isu dan krisis

Stone (2023) menyatakan beberapa hal dan aspek dilibatkan dalam tuntutan transformasi yang dilakukan diantaranya :

1. Peningkatan Kompetensi: Pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai melalui program pelatihan, workshop, dan kursus untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan di bidang pemerintahan, hukum, dan politik.
2. Digitalisasi: Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk dalam proses rekrutmen, evaluasi kinerja, dan pengembangan karier. Ini mencakup penerapan sistem manajemen informasi yang efisien dan penggunaan *platform online* untuk pelatihan dan pengembangan.
3. Penguatan Nilai Integritas: Meningkatkan kesadaran dan penerapan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas di kalangan pegawai, agar mereka mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan etika dalam menjalankan

- tugas-tugas pemerintahan, hukum, dan politik.
4. Pengembangan Kepemimpinan: Mempersiapkan para pegawai untuk mengambil peran kepemimpinan melalui program mentoring, coaching, dan pengembangan kompetensi manajerial. Hal ini bertujuan untuk memastikan ada kaderisasi yang baik di lingkungan kerja.
 5. Kolaborasi dan Kerjasama: Meningkatkan budaya kerja yang kolaboratif di antara para pegawai dan antara instansi pemerintah lain, untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan dan program dapat diimplementasikan secara efektif.
 6. Penyesuaian dengan Dinamika Kebijakan: Memastikan bahwa pegawai selalu up-to-date dengan perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar mereka bisa memberikan masukan dan rekomendasi yang relevan dan tepat waktu kepada atasan atau pimpinan.

METODE PENELITIAN,

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana dinyatakan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan masalah mengenai program data/atau pengalaman yang dialami oleh peneliti. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Kendari khususnya pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai fokus penelitian yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2024. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive yaitu informan yang dipilih karena pertimbangan tertentu.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, maka peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi data. Data penelitian yang sudah terkumpul lalu diperiksa keabsahannya sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengecekan anggota serta kecukupan referensi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.

KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN PADA KANTOR STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ASN sebagai sumber daya manusia merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan. Baik buruknya kinerja pemerintahan juga sangat tergantung pada kinerja setiap ASN yang ada (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara). Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemimpin untuk dapat mendorong penciptaan kinerja ASN yang lebih optimal di tengah tuntutan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, kepemimpinan secara umum dan secara khusus kepemimpinan kewirausahaan sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi birokrasi di Indonesia, membuatnya lebih responsif, efisien, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal

serta mampu mendorong pencapaian tujuan yang direncanakan oleh suatu organisasi (Ghodang & Ghodang, 2023; Hasina & Satyadharma, 2023).

Temuan penelitian menemukan bahwa beberapa faktor yang menemukan pentingnya kepemimpinan kewirausahaan di kalangan ASN terutama pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

1. **Adaptasi terhadap Perubahan dan Disrupsi**
Perubahan Teknologi: Perkembangan teknologi digital menuntut birokrasi untuk beradaptasi dengan cepat. Pemimpin yang memiliki jiwa kewirausahaan dapat mendorong ASN untuk lebih terbuka terhadap inovasi teknologi, seperti e-government, digitalisasi layanan publik, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. **Efisiensi dan Produktivitas**
Reformasi Birokrasi: Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan produktif. Pemimpin kewirausahaan dapat menginspirasi ASN untuk menemukan cara-cara baru dalam meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Pengelolaan Sumber Daya: Dengan meningkatnya tekanan untuk pengelolaan anggaran yang lebih ketat, pemimpin dengan jiwa kewirausahaan dapat membantu ASN untuk mengelola sumber daya secara lebih kreatif dan efektif, memanfaatkan inovasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah.
3. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
Orientasi pada Hasil dan Pelayanan: Pemimpin kewirausahaan cenderung fokus pada hasil dan dampak nyata, bukan hanya pada proses. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih nyata dari kebijakan dan program pemerintah.
4. **Pengembangan Kapasitas ASN**
Peningkatan Kompetensi: Dengan dinamika tugas yang semakin kompleks, ASN perlu meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus. Kepemimpinan kewirausahaan berperan dalam mendorong budaya belajar, pelatihan yang berkelanjutan, dan pengembangan karier yang berorientasi pada inovasi.
5. **Menghadapi Tantangan Sosial dan Ekonomi**
 - a. Pandemi dan Krisis: Pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya pemimpin yang dapat berpikir dan bertindak secara kewirausahaan dalam menghadapi situasi krisis. Pemimpin yang mampu berinovasi dan mengambil keputusan yang cepat sangat dibutuhkan untuk mengelola krisis dengan efektif.
 - b. Ketidakpastian Ekonomi: Ketidakpastian ekonomi global dan domestik menuntut ASN untuk lebih proaktif dan inovatif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
6. **Meningkatkan Kepercayaan Publik**
Transparansi dan Akuntabilitas: Kepemimpinan kewirausahaan mendorong praktik

transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat, yang penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. ASN yang dipimpin oleh pemimpin kewirausahaan cenderung lebih responsif dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat.

Hasil penelitian secara keseluruhan menemukan bahwa pada organisasi (Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara) memiliki kemampuan dalam mencerminkan kepemimpinan kewirausahaan dalam menaungi bawahan yang kami dipercaya dimana organisasi berupaya semaksimal untuk selalu beradaptasi dengan perubahan terutama perubahan teknologi, karena tanpa adanya staf yang memiliki kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan, tentu kinerja instansi tidak akan maksimal. Selain itu orientasi organisasi selalu berbasiskan pada peningkatan layanan publik dimana dalam segala ruang lingkup organisasi bekerja, penekanan bahwa ASN itu melayani masyarakat.

KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN PADA KANTOR STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tugas pokok dan fungsi staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan transformasi digital pemerintahan. Sebagai individu yang berperan memberikan masukan strategis kepada pemimpin atau kepala daerah, staf ahli ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi birokrasi berbasis digital yang dilakukan selaras dengan tujuan pemerintahan yang lebih luas, serta mematuhi prinsip hukum dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Rahadian (2019) dan Widanarto (2019) menyatakan beberapa keterkaitan utama dari peran kantor Staf Ahli terhadap tugas pokok fungsi dikaitkan dengan transformasi birokrasi berbasis layanan digital pemerintahan terutama yang terjadi di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara

1. Penyusunan dan Rekomendasi Kebijakan

Analisis Kebijakan: Kantor Staf Ahli Gubernur bertanggung jawab melakukan analisis mendalam terhadap berbagai kebijakan pemerintahan, hukum, dan politik yang akan diimplementasikan. Ini termasuk mengevaluasi kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi area yang memerlukan reformasi atau peningkatan.

Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan analisis yang dilakukan, kantor ini memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai kebijakan yang dapat mempercepat proses transformasi birokrasi, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Hukum dan Regulasi: Kantor Staf Ahli Gubernur memainkan peran dalam mengkaji dan merekomendasikan reformasi hukum dan regulasi yang dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ini termasuk menyederhanakan regulasi yang terlalu birokratis dan memfasilitasi proses yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi Kebijakan *Good Governance*: Kantor ini juga mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance di seluruh instansi pemerintah daerah, termasuk

transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah.

3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Birokrasi

Monitoring Pelaksanaan Kebijakan: Kantor Staf Ahli Gubernur bertugas memantau pelaksanaan kebijakan pemerintahan, hukum, dan politik di tingkat daerah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan.

Evaluasi Program: Kantor ini juga melakukan evaluasi terhadap program-program reformasi birokrasi yang sudah berjalan, memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan, serta memastikan program tersebut berkontribusi positif terhadap transformasi birokrasi.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Birokrasi

Pengembangan Kompetensi Pegawai: Dalam mendukung transformasi birokrasi, Kantor Staf Ahli Gubernur dapat merekomendasikan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintahan daerah, terutama yang terkait dengan peningkatan kompetensi di bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Peningkatan Kepemimpinan: Kantor ini juga dapat memfasilitasi pengembangan kepemimpinan di kalangan aparatur pemerintah, memastikan bahwa pemimpin di berbagai tingkatan memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan dan inovasi dalam birokrasi sehingga akan mendorong terciptanya ASN yang berkualitas yang berdampak pada kinerja instansi di lingkup Pemrov Sulawesi Tenggara yang memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan layanan optimal kepada masyarakat.

5. Kolaborasi dan Sinergi Antar Instansi

Koordinasi Antar Instansi Pemerintah: Kantor Staf Ahli Gubernur berperan dalam mengkoordinasikan upaya transformasi birokrasi dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, memastikan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan nasional. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil: Kantor ini juga dapat mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta menggalang dukungan dan partisipasi publik.

6. Advokasi Kebijakan dan Hubungan Politik

Advokasi Kebijakan kepada Legislatif: Kantor Staf Ahli Gubernur bertugas mengadvokasi kebijakan reformasi birokrasi kepada lembaga legislatif daerah (DPRD), memastikan bahwa kebijakan tersebut mendapatkan dukungan politik yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Pengelolaan Dinamika Politik:

Kantor ini juga memonitor dan mengelola dinamika politik yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan transformasi birokrasi, serta memberikan saran strategis kepada Gubernur untuk menjaga stabilitas politik di daerah.

7. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan Transparansi: Kantor ini mendorong inisiatif-inisiatif yang meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, seperti implementasi e-government dan open data, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah. Pengawasan dan Akuntabilitas:

Dengan memberikan rekomendasi mengenai mekanisme pengawasan yang lebih

kuat, kantor ini membantu memastikan bahwa seluruh program pemerintah dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

8. Respons terhadap Isu dan Krisis

Manajemen Krisis: Dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau konflik politik, Kantor Staf Ahli Gubernur memainkan peran penting dalam merumuskan respons kebijakan yang cepat dan efektif, serta memastikan bahwa birokrasi dapat tetap berfungsi dengan baik dalam menghadapi tantangan tersebut. Hal ini penting sebagai jawaban dari kehadiran pemerintah dalam menjawab setiap isu atau krisis yang berkembang di tengah masyarakat.

KETERKAITAN TRANSFORMASI SDM DAN PENTINGNYA PERAN KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN PADA KANTOR STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Keterkaitan transformasi SDM dan dorongan pentingnya peran kepemimpinan kewirausahaan sangat erat terutama dalam mendorong pengembangan organisasi publik yang adaptif dan inovatif, seperti yang diperlukan di Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Berikut adalah beberapa poin keterkaitannya:

1. Pemimpin Kewirausahaan sebagai Agen Perubahan: Kepemimpinan kewirausahaan berfokus pada inovasi, kreativitas, dan pengambilan risiko untuk mencapai tujuan. Dalam proses transformasi SDM, pemimpin yang memiliki jiwa kewirausahaan akan berperan sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi dalam pengelolaan SDM, seperti memperkenalkan metode baru dalam pelatihan, rekrutmen, dan pengembangan karier yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
2. Mendorong Inovasi dan Kreativitas: Kepemimpinan kewirausahaan menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kreativitas. Dalam transformasi SDM, ini berarti menciptakan ruang bagi pegawai untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara kerja yang lebih efisien, serta memberi mereka kebebasan untuk mencoba pendekatan baru dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
3. Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan: Transformasi SDM sering kali mencakup pengembangan kompetensi pegawai, termasuk kemampuan kewirausahaan seperti inovasi, adaptasi, dan kemampuan berpikir strategis. Dengan mengintegrasikan konsep kewirausahaan dalam pelatihan dan pengembangan SDM, organisasi dapat menciptakan tim yang lebih tangguh dan mampu beradaptasi dengan perubahan dinamis di bidang pemerintahan, hukum, dan politik.
4. Pengelolaan Risiko: Pemimpin kewirausahaan cenderung lebih terbuka terhadap pengambilan risiko yang terukur. Dalam konteks transformasi SDM, ini berarti mendorong pegawai untuk mengambil inisiatif dan mencoba pendekatan baru, meskipun ada risiko kegagalan, dengan pandangan bahwa kegagalan juga merupakan bagian dari proses belajar dan pengembangan.
5. Fokus pada Hasil dan Dampak: Kepemimpinan kewirausahaan sangat

berorientasi pada hasil dan dampak jangka panjang. Transformasi SDM yang dipimpin oleh pemimpin kewirausahaan akan fokus pada hasil nyata dari pengembangan SDM, seperti peningkatan kinerja, inovasi dalam layanan publik, dan adaptasi terhadap kebijakan baru, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

6. Budaya Kerja yang Dinamis dan Adaptif: Kepemimpinan kewirausahaan membantu menciptakan budaya kerja yang dinamis dan adaptif, yang sangat penting dalam proses transformasi SDM. Budaya ini memungkinkan pegawai untuk lebih responsif terhadap perubahan dan berkontribusi secara aktif dalam mencapai tujuan strategis organisasi.

KESIMPULAN

Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara memainkan peran strategis dalam mendorong kepemimpinan kewirausahaan dan transformasi birokrasi di tingkat pemerintahan daerah. Melalui analisis kebijakan, penguatan tata kelola, pemantauan kinerja, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi antarinstansi, kantor ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan birokrasi yang lebih inovatif, efisien, dan responsif.

Kepemimpinan kewirausahaan yang didorong oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya membantu dalam mengadaptasi birokrasi terhadap perubahan dan tantangan zaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah reformasi birokrasi memiliki dampak nyata yang positif bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan, kantor ini menjadi pilar penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel, sesuai dengan tuntutan era modern.

Melalui peran ini, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan bahwa transformasi birokrasi tidak hanya sekadar perubahan struktural, tetapi juga perubahan budaya dan mentalitas yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pelayanan publik yang unggul. Dengan demikian, kantor ini berperan sebagai katalisator dalam perjalanan menuju birokrasi yang lebih efektif dan adaptif, siap menghadapi tantangan masa depan dengan solusi-solusi yang kreatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghodang, H., & Ghodang, F. (2023). *Kepemimpinan Technopreneurship*. Halaman Moeka Publishing.
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Peran Pemimpin dalam Pencapaian Tujuan Organisasi: Studi Pada DPD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 25–34. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.175>
- Holidin, D., Hariyati, D., & Sunarti, E. S. (2017). *Reformasi Birokrasi dalam Transisi*. Kencana.
- Rahadian, A. . (2019). Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance pada Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Stiarni*, 85–94.
- Setyasih, E. T. (2022). Transformasi Digital Pemerintah Daerah Di Era Society 5.0: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), 59–66. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.657>
- Stone, K. (2023). Tinjauan Kewirausahaan Dalam Kepemimpinan, Pendidikan Dan

- Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kejaksaaan Tinggi *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(03), 739–753. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/24197>
- Thoha, M. (2017). *Dinamika ilmu administrasi publik (Edisi Pertama)*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Widanarto, A. (2019). Transformasi Manajemen Pemerintahan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 75–94. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.337>
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.